



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1906>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Fakultas Hukum Tata Pemerintahan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM PAS KENCAN DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN GARUT

Eva Eviany¹, Alvita Kumara Wasistiyana², Andi Dina Noor Fitria Rahman³, Adrian Rianda Yogaswara⁴

^{1,2,3,4} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Sumedang, Indonesia

Corresponding author: akwasistiyana@gmail.com

Received: 25 Agustus 2021, Accepted: 21 November 2021; Published Online: 22 November 2021

ABSTRAK

Kabupaten Garut merupakan daerah yang menempati urutan ketiga kabupaten terluas di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 3.074,07 km². Menyikapi hal tersebut, Satpol PP Kabupaten Garut mengembangkan inovasi program Patroli Siaga Keamanan Kecamatan Kabupaten Garut atau yang dikenali dengan Pas Kencan guna meminimalisir segala gangguan tibatranmas. Tujuan penelitian ini untuk memahami gambaran pelaksanaan program Pas Kencan beserta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis sedangkan data dikumpulkan melalui kajian pustaka dan wawancara dengan Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Garut. Penelitian ini juga menggunakan model evaluasi CSE-UCLA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pas Kencan dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi. Hambatan-hambatan yang dihadapi yakni terkait minimnya anggaran dan kurangnya jumlah personel. Upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut ialah dengan mengembangkan dan menyempurnakan program Pas Kencan ini dengan sistem berbasis internet atau *call center*.

Kata kunci: Satpol PP, Kabupaten Garut, Inovasi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

ABSTRACT

Garut Regency is an area that ranks third largest district in West Java Province with an area of 3,074.07 km². In response to this, the Garut Regency's Municipal Police developed an innovative Security Alert Patrol Program or well known as "Pas Kencan" to minimize all disturbance of public order and security. The purpose of this study was to understand the description of Pas Kencan program implementation and its inhibiting factors. This study used a descriptive analysis method while data were collected through literature review and interviews with the Head of the Public Order

Copyright (c) 2021 Eva Eviany, Alvita Kumara Wasistiyana, Andi Dina Noor Fitria Rahman, Adrian Rianda Yogaswara



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

and Security Division of the Garut Regency's Municipal Police. This study also uses the CSE-UCLA evaluation model. The results of the study indicate that the Pas Kencan Program can be said to have been running well, but in its implementation, there are things that need to be evaluated. The obstacles faced are related to the lack of budget and numbers of personnel. Efforts that can be made in dealing with those obstacles are by developing and perfecting the Pas Kencan program with an internet-based system or call center.

Keywords: Municipal Police, Garut Regency, Innovation, Public Peace and Order

PENDAHULUAN

Kabupaten Garut merupakan daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk mencapai 2.58 juta jiwa dengan sebaran penduduk 719 jiwa/km². Dilansir dari data terbaru Sensus Penduduk 2020 Provinsi Jawa Barat, luas wilayah Kabupaten Garut ialah 3.074,07 km² sehingga Kabupaten Garut menempati urutan ketiga dengan kabupaten terluas se-Jawa Barat setelah Kabupaten Sukakabumi di peringkat pertamanya (luas wilayah 4.145,70 km²) dan Kabupaten Cianjur di peringkat keduanya (luas wilayah 3.840,16 km²). Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan, dan 421 desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Wilayah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang,
- b. Wilayah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Majalengka,

- c. Wilayah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur,
- d. Wilayah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Berdasarkan data tersebut, maka wilayah Kabupaten Garut dapatlah dikatakan luas, sehingga sangatlah penting penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan pelanggaran hukum serta gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu dari beberapa aspek yang menjadi urusan wajib pemerintah. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa bahwa aspek keamanan dan ketertiban umum merupakan urusan konkuren dan urusan wajib pemerintah terkait pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mana dalam hal ini kewenangan dan tugas pemerintah dalam menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum tersebut, perlu adanya aparatur yang menangani hal tersebut, yakni Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa dikenal dengan Satpol PP. Kata Pamong dalam istilah Satpol PP tersebut dapat diartikan sebagai pengurus, pengasuh, atau pendidik, sedangkan kata Praja dapat dimengerti sebagai negeri, kerajaan atau kota sehingga Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. Kedua arti kata tersebut didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 1 ayat (1), disampaikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yakni perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Adapun kewenangan Satpol PP terhadap warga masyarakat, apatur, dan badan hukum, yakni menertibkan mereka yang melanggar Perda dan/atau Perkada; menindak mereka yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman sekitarnya; menyelidiki yang diduga melanggar Perda

dan/atau Perkada; dan menindak secara administratif yang melanggar Perda dan/atau Perkada.

Lebih lanjut lagi, Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat menyebutkan bahwa kegiatan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman yang dimaksud yakni terdiri dari kegiatan deteksi dan cegah dini; pembinaan dan penyuluhan; patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, dan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai tanggapan dari perkembangan masyarakat Kabupaten Garut saat ini, masih saja terdapat berbagai gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, Satpol PP Kabupaten Garut harus melaksanakan salah satu kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dalam bentuk patroli siaga. Maka dari itu, untuk meminimalisir segala gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tersebut, Satpol PP Kabupaten Garut mengembangkan inovasi program yakni Patroli Siaga Keamanan Kecamatan Kabupaten Garut atau yang dikenali dengan Pas Kencan. Meskipun tidak ada keluhan dari

masyarakat terkait pelaksanaan program Pas Kencan, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Garut menyatakan terdapat hal-hal yang harus ditingkatkan dalam pelaksanaan program Pas Kencan ini.

Menurut Widoyoko (2012:6), evaluasi adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya. Sedangkan menurut Anne Anastasi, evaluasi yakni proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan dicapai oleh seseorang. Evaluasi sendiri merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Sedangkan, menurut William A. Mehrens dan Irlin J. Lehman (1978) evaluasi ialah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif alternatif keputusan. Kegiatan evaluasi dilakukan karena memiliki tujuan bagi program yang sedang berjalan maupun direncanakan agar dapat dicapai, tujuan tersebut antara lain:

a. Evaluasi bertujuan agar kita mengetahui seberapa besar seseorang

dapat menguasai kompetensi yang sudah ditetapkan.

- b. Evaluasi bertujuan agar mengetahui kesulitan-kesulitan yang terdapat dalam menjalankan suatu program atau merencanakan program tersebut, sehingga solusi dapat dipikirkan segera.
- c. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dari program yang sedang dijalankan, apakah program tersebut berjalan sesuai dengan keinginan dan dapat membawa perubahan ke arah yang baik atau sebaliknya.
- d. Evaluasi bertujuan sebagai informasi yang penting untuk melakukan evaluasi, sehingga kesulitan maupun kekurangan yang ada dapat segera diatasi, serta dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan untuk hal-hal berikutnya.

Adapun tahapan dalam penelitian ini yakni menggunakan model evaluasi CSE-UCLA yang diperkenalkan oleh Marvin C. Alkin sebagai acuannya (Yayibnaxis, dalam Divayana 2015). Menurut Alkin, evaluasi ialah suatu proses yang terdiri dari meyakinkan keputusan, pengumpulan dan pemilahan informasi dan analisis informasi, sehingga dapat tercipta alternative keputusan berdasarkan laporan yang

telah dibuat dari proses tersebut. Model CSE-UCLA terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, dan hasil.

1. *Need Assessment*, pada tahap ini tentukan terlebih dahulu pembahasan yang ingin dievaluasi, yaitu program apa yang akan dievaluasi dari bidang tertentu
2. *Program planning*, pada tahap ini dilaksanakan pengumpulan data yang berkaitan dengan rencana pemenuhan kebutuhan program, apakah berhasil disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut.
3. *Formative evaluation*, yakni dengan mencatat setiap data dan tiap-tiap informasi yang disesuaikan dengan rencana program yang dilaksanakan. Selanjutnya, dilaksanakan pengolahan data dan analisis terhadap data yang ada serta menentukan tolak ukur pada saat melakukan evaluasi.
4. *Summative evaluation*, pada tahap ini setelah semua data tentang hasil dan dampak dari program terkumpul, dibuatlah laporan hasil evaluasi. Melalui evaluasi sumatif ini, selanjutnya dapat diketahui apakah tujuan yang dirumuskan untuk program sudah tercapai.

Berdasarkan pemaparan definisi evaluasi di atas, dapat dipahami bahwa evaluasi berarti kegiatan mengumpulkan informasi tentang terlaksananya suatu program yang selanjutnya digunakan untuk menentukan apakah tujuan program tersebut sudah tercapai sehingga dapat juga terciptat suatu pertimbangan alternatif terkait pelaksanaan program lainnya di kemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, kajian karya ilmiah ini akan membahas beberapa hal, yang di antaranya: Bagaimana evaluasi pelaksanaan program Pas Kencan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut serta apa saja faktor pengambat pelaksanaan program Pas Kencan tersebut. Adapun tujuan dari rumusan masalah penulisan ini ialah untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan program Pas Kencan serta untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan program Pas Kencan.

Penelitian sebelumnya yang membahas evaluasi pelaksanaan program kerja Satpol PP terkait penertiban umum cukup banyak ditemukan, tetapi terkait program patroli ini sendiri masih sangat sedikit. Sebagaimana penelitian Effendy memfokuskan penelitian pada pembahasan bagaimana peran Satpol PP

dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Hasil temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa patroli yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Berau sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar gangguan-gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dapat teratasi sehingga perlu adanya penambahan personel untuk patroli yang lebih maksimal (Effendy, 2018). Penulis melaksanakan pengkajian yang berbeda dan belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, yaitu program kegiatan patroli Satpol PP di Kabupaten Garut sebagai obyek penelitian dengan indikator evaluasi CSE- UCLA milik Alkin sebagai acuan tahapan penelitian ini.

METODE

Metode penulisan artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Menurut Sugiyono (2013:21), penelitian deskriptif analisis berarti mendeskripsikan dan menganalisis data yang terkumpul secara apa adanya tanpa maksud menciptakan suatu kesimpulan yang general. Dalam pengumpulan data dan informasi terkait fokus penelitian, penulis menggunakan teknik wawancara kepada Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum via daring melalui aplikasi pesan instan *Whatsapp*. Melalui

wawancara ini, peneliti mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan program Pas Kencan beserta factor-faktor penghambatnya. Adapun data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan, berupa kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah. Menurut Sugiyono (2012), studi ini dilaksanakan agar penulis dapat menghidnari peniruan, pengulangan, plagiat, maupun swaplagiat. Sedangkan analisis data dilakukan dengan pengkondensasian data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Saldana et al., n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara yang telah dilaksanakan, maka diperoleh data penelitian yang selanjutnya dianalisis. Adapun pelaksanaan penelitian, yakni dengan mengacu pada tahapan model evaluasi CSE-UCLA yang dikembangkan oleh Marvin C. Alkin, yang terdiri dari empat tahapan, yakni, perencanaan, pengembangan, implementasi, dan hasil.

1. Gambaran Pelaksanaan Program Pas Kencan

A. *Need Assessment*

Dasar dari dilaksanakannya program Pas Kencan ini ialah sebagai bentuk pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 26

Tahun 2020 terkait tugas tratribum yang di dalamnya ada patroli serta luas wilayah kabupaten garut yang begitu luas sehingga memerlukan pengawasan yang lebih ekstra. Meskipun Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Garut menyatakan bahwa pelaksanaannya sejauh ini sudah maksimal, tetapi terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi secara internal. Wilayah Kabupaten Garut yang begitu luas berakibat pada jangkauan patroli yang lebih luas pula. Hal tersebut terkadang juga dipersulit dengan banyaknya gangguan tibumtranmas yang terjadi sehingga pihak Satpol PP Kabupaten Garut dalam pelaksanaan program Pas Kencan itu sendiri serta diharuskannya mengerjakan tugas pokok sehari-hari di lapangan di saat yang bersamaan.

B. Program Planning

Adapun persiapan pelaksanaan program pelaksanaan Pas Kencan diawali dengan berkoordinasi bersama kecamatan. Kecamatan akan mengajukan kepada Satpol PP untuk membantu menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan alat transportasi dan

juga akomodasi dan perlengkapan patroli pada umumnya ditunjang dengan personil yang memadai dikarenakan saat ini jumlah personil yang masih kurang.

C. Formative Evaluation

Pengumpulan data penulisan didapat melalui proses wawancara kepada kepala bidang ketenteraman dan ketertiban umum Muhammad Topan Sandi S,IP. Secara umum, Program Pas Kencan ini mengusung tindakan siaga dengan mengkolaborasikan sinergitas Polisi Pamong Praja bersama forum komunikasi pimpinan kecamatan yang berada di Kabupaten Garut. Melalui program ini, kepala seksi keamanan dan ketertiban kecamatan dapat berkoordinasi dengan Satpol PP terkait pelaksanaan patroli yang dibutuhkan. Program Pas Kencan ini dilaksanakan dua kali dalam satu bulan, dalam pembagian regu-regu yang terdiri dari 12-13 orang. Akan tetapi, untuk kegiatan Pas Kencan ini sendiri lebih sering dilaksanakan secara insidental, yang berarti menyesuaikan waktu-waktu rawan di titik tertentu yang ada di Kabupaten Garut, misalnya pada saat pelaksanaan libur sekolah atau libur hari raya.

Salah satu contoh pelaksanaannya, yakni patroli serta penertiban kerumunan masyarakat yang melakukan verifikasi untuk pencairan BPUM dan PKH (Hendy, 2021). Di tengah pandemi saat ini, Satpol PP Kabupaten Garut lebih fokus meningkatkan keamanan dan ketertiban di titik-titik keramaian seperti pasar, tempat ibadah, dan juga sekitaran jalan guna menjalankan protokol kesehatan dan untuk mendukung program pemerintah agar dapat menekan peningkatan kasus positif di Indonesia terkhusus pulau Jawa yang memiliki jumlah kasus positif tertinggi di Indonesia.

D. *Summative Evaluation*

Program Pas Kencan dapat dikatakan sudah berjalan baik, Satpol PP telah menunjukkan eksistensinya sebagai aparat yang dapat menjaga masyarakat dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di sekitarnya. Mereka langsung mengatasi gangguan yang terjadi dengan langsung turun ke lokasi saat itu juga. Adapun data lebih lengkap terkait rekapitulasi jumlah data penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Garut perkecamatan tersaji melalui gambar 3.1.

Di sepanjang tahun 2021, terhitung dari bulan Januari hingga bulan Agustus, tercatat bahwa terdapat 9 kasus

unjuk rasa, 3 kasus perkelahian, 5 kasus penganiayaan, 2 kasus pencurian roda empat, 30 kasus pencurian roda dua, 5 kasus pencurian umum, 1 kasus penipuan, 13 bencana banjir, 59 bencana longsor, 7 bencana angin topan, 59 bencana kebakaran hutan, 24 kecelakaan lalu lintas, 3 kasus tenggelam, 3 kasus bunuh diri, 4 kasus kecelakaan lainnya, 12 korban jiwa, 3 luka ringan, dan 18 kasus lainnya.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pas Kencan

Meskipun tidak ada keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan program Pas Kencan, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Garut selaku yang mewakili pihak Satpol PP Kabupaten Garut menyatakan: “terkait pelaksanaannya saat ini sudah maksimal, akan tetapi minimnya anggaran serta jangkauan yang begitu luas serta banyaknya terjadi gangguan tibumtranmas sehingga kita keteteran dalam pelaksanaan tugasnya di sambil tugas pokok sehari-hari di lapangan”. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program Pas Kencan ialah minimnya anggaran dan jangkauan

wilayah patroli yang begitu luas sehingga Satpol PP Kabupaten Garut cukup kesulitan dalam menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Di bawah ini, juga telah tersaji data perbandingan jumlah personel Satpol PP Kabupaten Garut tahun 2021 dengan luas wilayahnya.

Tabel 1.
Perbandingan Jumlah Personel Satpol PP Kab. Garut dan Luas Wilayahnya

	PNS	TKK	TKS	Luas Wilayah Kabupaten Garut
	(1)	(2)	(3)	
P	36	50	48	3.074,07 km ²
W	12	27	14	
Total	48	77	62	
	187			

Sumber: Wawancara terhadap Kepala Bidang Tratibum Satpol PP Kab. Garut

Berdasarkan data tersebut, hal ini berarti jika total Satpol PP dibagi dengan 42 kecamatan yang ada di Kabupaten Garut, maka supaya sama jumlahnya hanya akan ada 4-5 orang di setiap kecamatannya. Sedangkan, target pelaksanaan kegiatan Pas Kencan ini sendiri dalam sekali turunnya, harusnya terdiri dari 12-13 orang dalam satu regu patrolinya sehingga hal tersebut seolah

menampakkan bahwa Satpol PP Kabupaten Garut kekurangan jumlah personel. Maka dari itu, dengan di era yang serba digital saat ini, ada baiknya Satpol PP Kabupaten Garut sudah saatnya mulai mengembangkan sistem berbasis internet yang dapat meringankan pekerjaan. Misalnya saja, dengan mengembangkan aplikasi khusus pengaduan masyarakat Kabupaten Garut kepada Satpol PP Kabupaten Garut atau dapat juga berupa layanan *Call Center*. Di kemudian hari, jika rencana ini disepakati, perlu juga dilaksanakan sosialisasi terkait layanan baru tersebut sehingga masyarakat dapat mengenali dan memahami bagaimana operasional layanan tersebut.

Dalam pelaksanaan program Pas Kencan, Satpol PP Kabupaten Garut secara garis besar telah melaksanakan kegiatan patrolinya dengan baik. Akan tetapi, permasalahan terkait tidak meratanya pembagian jumlah anggota patroli antarkecamatan tetap harus ditingkatkan dalam kegiatan patroli siaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat (Sakti & Pribadi, 2018) Adapun alternatif dari kurangnya personel Satpol PP Kabupaten Garut dapat dilakukan dengan penyempurnaan Program Pas Kencan dengan sistem berbasis internet, baik melalui aplikasi ataupun call center.

Melalui penggunaan aplikasi atau *call center* tersebut, personel Satpol PP Kabupaten Garut tidak harus diturunkan semua dalam sekali pelaksanaan patroli sehingga ada yang juga berjaga sebagai penerima layanan tersebut. Hal ini sejalan dengan kajian Prasetya, bahwa ketersediaan sarana dan prasana sangatlah berpengaruh dalam kegiatan pelayanan masyarakat terutama dalam pelayanan pengaduan. Contohnya, melalui penyambungan koneksi internet, kinerja seseorang hingga komunikasi antar SKPD yang terkait bisa berjalan dengan lebih mudah dan efisien (Prasetya, Domai, Mindarti, 2020).

Penulis menemukan adanya faktor pendukung dari penyelenggaraan program Pas Kencan dalam mewujudkan kinerja yang lebih optimal yaitu dukungan dari pimpinan dalam hal pemberian pengarahan dan motivasi serta kerja sama dengan pihak pengembang aplikasi dan jaringan.

PENUTUP

Program Pas Kencan merupakan salah satu inovasi tindakan siaga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dengan mengkolaborasikan sinergitasnya bersama forum komunikasi pimpinan kecamatan. Dalam hal pelaksanaan program ini, kepala seksi keamanan dan

ketertiban kecamatan umumnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Polisi Pamong Praja terkait pelaksanaan patroli yang dibutuhkan. Adapun tindak lanjutnya yaitu dengan diturunkannya regu-regu patroli yang turun ke setiap kecamatan di Kabupaten Garut. Program Pas Kencan dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik, tetapi dalam prakteknya terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi, yakni jumlah personel Satpol PP yang kurang sesuai dibandingkan dengan wilayahnya yang begitu luas.

Rekomendasi yang penulis berikan untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud yakni dengan menambah frekuensi pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya penguasaan di bidang teknologi dan informasi agar dapat mendukung kinerja Satpol PP yang berkualitas dan profesional. Misalnya dengan mengembangkan dan menyempurnakan program Pas Kencan ini dengan sistem berbasis internet, baik melalui aplikasi ataupun *call center*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu dan peneliti hanya berfokus pada indikator evaluasi CSE-UCLA. Walaupun demikian, penulis selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan terkait masalah-masalah

lainnya dalam pelaksanaan program patroli Satpol PP. Penulis juga menyarankan untuk penulis selanjutnya agar lebih komprehensif dan mendalam, serta dapat memfokuskan pada kinerja Satpol PP lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, R. K., & Harsasto, P. (2017). Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora (Studi Kasus Perda No. 7 Tahun 2015). *Journal of Politic and Government ...*, 7, 1–22. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/16184>
- Barasandji, S., & Pawala, D. (2014). Peningkatan Kemampuan Siswa Membuat Kalimat Tanya melalui Teknik 5w 1h di Kelas IV SD Inpres Lobu Gio Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol . 1 No . 4 ISSN 2354-614X. *Jurnal Kreatif Tadulako*, 1(4), 55–66.
- BPS Provinsi Jawa Barat. (2020). *Potret Sensus Penduduk Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat Menuju Satu Data Kependudukan: Vol. 2102041.32* (Nomor 32000.2101).
- H. Burhanuddin, S. (2017). Efektifitas Pelaksanaan Patroli Terpadu dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas (pada Polres Bungo). *Serambi Hukum*, 11(01), 56–68.
- Hendy, A. (2021). *Tim Satgas Covid-19 Tertibkan Kerumunan Massa Saat Verifikasi Pencairan BPUM dan PKH*. PikiranRakyat.com. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-011774637/tim-satgas-covid-19-tertibkan-kerumunan-massa-saat-verifikasi-pencairan-bpum-dan-pkh>
- Ilham Muhammad. (2020). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Di Kabupaten Berau*. 8(1), 289–298.
- Meirianti, A. R. (2018). Efektivitas Cyber Public Relations Pada Media Sosial Instagram Satpol Pp Kota Surabaya. *Media dan Komunikasi*, 1. http://repository.unair.ac.id/80078/3/JURNAL_TSK.17 18 Mei e.pdf
- Nurdin, I. (2014). Budaya Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Kota Bandung. *Sosiohumaniora*, 16(3), 228. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5761>
- Prasetya, D. (2013). Analisis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dalam Rangka Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(6), 1151–1158.

- Rumondor, E. M., Sambiran, S., & Kimbal, A. (2020). Kualitas Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Aset Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1–12.
- Sakti, F. T., & Pribadi, G. (2018). Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 98–116. <https://doi.org/10.15575/jk.v1i2.3779>
- Sunarta. (2010). PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA (Kunci Keberhasilan Organisasi). *Informasi*, 36(2), 1–13. <https://doi.org/10.21831/informasi.v2i2.6197>
- Utomo, W. (2013). Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima. *Journal of Petrology*, 369(1), 1689–1699. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003><https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.018><http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2011.08.005><http://dx.doi.org/10.1080/00206814.2014.902757><http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.018>
- Westjavainc. (2021). *Provil Kabupaten Garut*. Kabupaten Garut. <https://westjavainc.org/municipal/kabupaten-garut/>